

BERHASIL STERILKAN AREA JALAN PERWAKILAN

Pemkot Yogya Beri Kebijakan Afirmatif ke Pedagang

YOGYA (KR) - Upaya Pemkot Yogya dalam melakukan pengosongan atau sterilisasi sisi utara Jalan Perwakilan berjalan optimal. Para pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan tersebut bahkan diberikan kebijakan afirmatif agar tetap dapat menjalankan aktivitas di tempat lain.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, menuturkan kebijakan afirmatif itu merupakan bentuk empati atas keberpihakan terhadap nasib pedagang. "Jadi itu bukan relokasi melainkan kami coba tawarkan, usulan kebijakan afirmasinya berupa potensi menjadi bagian dari pedagang di Pasar Klitikan Pakuncen," tuturnya, Jumat (13/1).

Total ada 17 pedagang yang sebelumnya menempati kios sisi utara Jalan Perwakilan. Kemarin mereka juga diajak untuk meninjau lokasi di Pasar Klitikan Pakuncen. Pemkot akan memberikan waktu seminggu ke depan atas tawaran kebijakan

afirmatif tersebut untuk selanjutnya dilakukan proses administrasi.

Dipilihnya Pasar Klitikan Pakuncen karena kawasan itu memiliki daya ungkit untuk dikembangkan. Hal ini karena pertumbuhan kuliner di sepanjang Jalan HOS Cokroaminoto semakin meningkat. Sehingga para pedagang tidak perlu mengganti komoditas dagangannya. "Kebanyakan mereka kan jualannya kuliner, jadi bisa semakin melengkap," tandasnya.

Di samping itu, penataan Pasar Klitikan Pakuncen juga akan dilakukan. Terlebih lokasinya cukup strategis, sehingga upaya pembenahan untuk mendukung sentra kuliner

akan terus didorong. "Seperti dulu lantai dua Pasar Kranggan kondisinya sepi, namun sekarang cukup diminati. Harapannya nanti juga seperti itu," imbuhnya.

Terkait sterilisasi Jalan Perwakilan, Pemkot Yogya memiliki kewenangan dalam hal teknis di lapangan. Sedangkan Pemda DIY lebih pada aspek kebijakan yang akan menjadikannya sebagai bagian dari Jogja Planning Galery. Sehingga kiprah Pemkot justru selalu berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak. Akan tetapi alas hak di sana merupakan milik Kasultanan yang diberikan pengelolaannya kepada Pemda DIY.

Oleh karena itu ketika Pemda DIY hendak memanfaatkan untuk kepentingan lain yakni Jogja Planning Galery, maka Pemkot Yogya mengambil peran teknis. Terutama memastikan tidak ada aktivitas di ruas sisi utara Jalan Perwakilan, kemudi-

an melakukan pengosongan atau sterilisasi. "Sejak 4 Januari sudah tidak ada aktivitas. Kemudian upaya pengosongan kami beri waktu hingga besok 14 Januari. Setelah itu baru kami serahkan ke DIY untuk tahapan pembangunannya," papar Aman.

Terhadap para pedagang yang terdampak, Pemkot Yogya sebetulnya tidak memiliki kewajiban untuk relokasi. Hal ini karena pedagang tidak memiliki hubungan dengan para pihak, baik pemerintah maupun Kraton. Namun demikian, pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Pemkot ialah upaya penataan sehingga aspek kemanusiaan atau empati tetap dikedepankan. Pendekatan tersebut yang mendasari adanya kebijakan afirmatif kepada para pedagang.

Sebelum di Jalan Perwakilan, Pemkot bahkan sudah beberapa kali menjalankan fungsi penataan di kawasan Malioboro.



KR-Istimewa

Para pedagang di Jalan Perwakilan meninjau lokasi Pasar Klitikan Pakuncen didampingi unsur Pemkot Yogya.

Terutama diawali revitalisasi jalur pedestrian sepanjang Malioboro dengan memindahkan parkir sepeda motor di sisi timur, kemudian dilanjutkan pemindahan PKL yang ada di selasar yang kini menempati teras Malioboro. Be-

gitu pula sterilisasi pedagang di Jalan Pasar Kembang. Seluruhnya dilakukan dengan pendekatan sosiologis sehingga membuahkan hasil yang optimal.

"Kami akan terus menjalankan fungsi, karena ke-

bijakan tanpa didukung infrastruktur dari aspek sosial akan sulit. Apalagi Kota Yogya agak spesifik dibandingkan daerah lain di DIY. Aspek sosiologisnya cukup strategis sehingga perlu pendekatan yang tepat," tandasnya. **(Dhi)-f**

TIGA KALI LIPAT DARI TARGET 2022

7,4 Juta Wisatawan Kunjungi Yogya

YOGYA (KR) - Sepanjang tahun 2022 lalu total tercatat 7,4 juta wisatawan mengunjungi Kota Yogya. Tingkat kunjungan tersebut merupakan tiga kali lipat dari sebelumnya ditargetkan Dinas Pariwisata Kota Yogya.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya Wahyu Hendratmoko, menuturkan target kunjungan wisatawan yang ditetapkan pada tahun 2022 lalu sebanyak dua juta wisatawan. "Target tersebut sebenarnya sudah terlampaui saat tengah tahun. Capaian sampai 31 Desember 2022 ternyata mencapai sekitar 7,4 juta wisatawan. Dari total kunjungan tersebut sekitar 800.000 wisatawan di antaranya berkunjung pada Desember 2022 atau saat libur akhir tahun," tuturnya, Jumat (13/1).

Menurut Wahyu, tingginya tingkat kunjungan tersebut juga berdampak pada masa tinggal dan tingkat belanja selama di Kota Yogya. Bahkan masa tinggal dan belanja juga melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Yogya pada 2022 mencapai 1,86 hari atau melebihi target 1,7 hari. Begitu juga dengan belanja

wisatawan yang mencapai Rp 1,97 juta per wisatawan dari target Rp 1,6 juta per wisatawan.

Meskipun seluruh indikator menunjukkan angka yang positif, namun pihaknya tetap akan berupaya melakukan pembenahan di berbagai sektor untuk mendukung pengembangan pariwisata pada 2023. Pembenahan tersebut salah satunya pelayanan informasi bagi wisatawan dibuka pada momentum tertentu saat kunjungan wisatawan di Yogya mengalami kenaikan seperti saat libur sekolah, liburan, dan akhir tahun. "Kami juga melihat perlunya pengembangan 18 kampung wisata dengan promosi yang lebih gencar. Terutama untuk memastikan kesiapan kampung wisata menerima wisatawan," urainya.

Sementara Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Oleg Yohan, mengatakan Dinas Pariwisata perlu mengambil peran layaknya dirigen dalam pengembangan pariwisata di Kota Yogya. Dengan begitu Dinas Pariwisata mampu memberikan aba-aba dalam menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah lain agar seirama untuk mengembangkan pari-

wisata yang menjadi lokomotif perekonomian di Yogya.

Menurutnya, Kota Yogya sudah memiliki magnet yang menarik bagi wisatawan untuk selalu datang berkunjung sehingga yang perlu dilakukan adalah mempertahankan dan terus mengembangkan magnet tersebut agar wisatawan yang berkunjung semakin banyak. Selama berkunjung di Yogya wisatawan harus dipastikan dapat menikmati suasana dengan aman dan nyaman. Untuk mewujudkannya, maka pembinaan kepada pelaku usaha jasa pariwisata tetap harus dilakukan. "Berbagai kejadian, seperti pelaku usaha yang menerapkan harga tidak wajar tidak boleh terus kembali terulang terjadi karena hal itu akan membuat wisatawan merasa tidak nyaman, merusak citra pariwisata," katanya.

Selain itu, promosi pariwisata juga tetap harus dilakukan agar Kota Yogya semakin dikenal, tidak hanya untuk wisatawan domestik tetapi juga mancanegara. Dalam menggelar promosi dapat menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat. **(Dhi)-f**

TAK SEKADAR MENCARI PRESTASI

Porseni NU Mempererat Silaturahmi

YOGYA (KR) - Kontingen Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) PWNU DIY diharapkan mampu mempererat silaturahmi lewat ajang kompetisi ini. Untuk itu para peserta asal DIY diharapkan mampu menjaga nama baik DIY dengan menjadi peserta Porseni NU yang mampu bersikap baik.

"Saya *ndherek* titip nama DIY, di manapun berada. Mari kita menjaga sikap dan adab silaturahmi, sehingga Porseni ini tidak hanya bertujuan mencari prestasi belaka, tapi yang paling penting adalah silaturahmi dengan seluruh saudara kita," pesan Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X saat menerima kunjungan kontingen Porseni PWNU DIY di Gedhong Pare Arom, Kompleks Kepatihan, Jumat (13/1).

Porseni NU 2023 akan diadakan di Surakarta, Jawa Tengah (14 - 22 Januari). Ajang tingkat nasional terse-

but rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI. Porseni NU menjadi wadah kompetisi yang diikuti oleh para generasi muda NU, mulai dari kalangan pelajar, santri, dan mahasiswa.

Wagub DIY mengingatkan, adanya silaturahmi membawa berkah tersendiri. Namun demikian, prestasi bukan berarti tidak penting karena yang terpenting adalah bisa menambah saudara dan bisa saling mengenal dengan kontingen dari daerah lain. "Dengan saling mengenal, kita menjadi lebih paham dan bisa saling menerima perbedaan. Saya doakan semoga semuanya lancar. Semoga kontingen dari DIY, dari berangkat sampai kembali sehat dan selamat," imbuh Paku Alam X.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWNU DIY, Zuhdi Muhdlor menyatakan, kontingen PWNU DIY akan me-

ngirimkan 310 orang yang terdiri dari peserta dan official. Kontingen PWNU DIY sendiri dijadwalkan mengikuti cabang olahraga sepak bola, bulutangkis, bola voli, dan pencak silat.

"Kalau untuk bidang seni, DIY mengikuti cabang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Musabaqah Tahsibul Alfiah (MTA), dan hafalan syair gramatikal Bahasa Arab. Jadi ajang ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk menjadi wadah peningkatan prestasi sekaligus kesempatan bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah," terangnya.

Selain berbagai pertandingan olahraga dan seni, PWNU DIY juga diminta mengirim 3.000 orang untuk mengikuti kegiatan jalan santai pada rangkaian Porseni NU 2023. Kegiatan jalan santai tersebut ditargetkan akan diikuti oleh 40.000 orang. **(Ria)-f**

SOAL TUNGGAKAN HOTEL ACARA PESPARAWI

Pemda DIY Serahkan Pengusutan ke Pihak Berwenang

YOGYA (KR) - Kasus dugaan tunggakan pembayaran hotel acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII yang diadakan di DIY pada Juni 2022, menjadi perhatian sejumlah kalangan. Hal itu dikarenakan 61 hotel yang memberikan akomodasi untuk para tamu di acara Pesparawi hingga kini belum menerima pembayaran dari pihak event organizer (EO) dengan nominal sekitar Rp 11 miliar. Menyikapi kasus tersebut Pemda DIY menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang (kepolisian). Terlebih sejumlah pihak hotel karena merasa dirugikan telah melakukan pelaporan ke pihak berwajib.

"Kami berharap ada itikad baik dari penyelenggara untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga saja ada perkem-

bangan yang baik. Mungkin yang bersangkutan bisa datang dan ada itikad baik untuk berembug. Kalau belum punya dana ya sampai kapan, kami berharap masih bisa dibicarakan baik-baik. Meski berdasarkan informasi terakhir, persoalan ini sudah di tangan polisi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Jumat (13/1).

Baskara Aji mengungkapkan, berdasarkan informasi, selain hotel ada belasan vendor yang belum dibayar tunggakannya. Sedangkan untuk jasa transportasi, pihak EO sudah melakukan pelunasan. Adanya sikap dari pihak EO yang tidak komunikatif untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang tertunda sempat disayangkan banyak pihak. Karena perwakilan EO tidak pernah datang da-

lam pertemuan atau audiensi yang digelar di DIY.

Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, kegiatan Pesparawi masih menyisakan tunggakan hotel sekitar Rp 11 Miliar. Padahal dari sekitar Rp 40 miliar biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan kegiatan, Pemda sudah menyumbang Rp 10 miliar dan Kemenag sebesar Rp 20 miliar. Bantuan tersebut juga sudah diserahkan kepada penyelenggara Pesparawi.

"Saya dan teman-teman mempertanyakan tanggung jawab pihak penyelenggara Pesparawi. Karena berdasarkan informasi yang saya terima pemilik EO justru lari ke Singapura," ujamnya. **(Ria)-f**

JUMLAH KASUS SEMAKIN MENURUN

Tahun 2024, Optimis Yogya Bebas Stunting

YOGYA (KR) - Upaya penanganan kasus stunting di Kota Yogya menunjukkan hasil positif. Jumlah kasus diketahui terus mengalami penurunan sehingga target tahun 2024 bebas stunting optimis mampu dicapai.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya drg Emma Rahmi Aryani, mengungkapkan di tahun 2022 prevalensi stunting di Kota Yogya sudah mengalami penurunan mencapai angka 10,80 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 12,08. "Berdasarkan pantauan kami pada Agustus 2022, kasus stunting di Kota Yogya ini turun, dengan jumlah kasus 1.225 anak dari 14.277 sasaran anak yang dipantau di masing-masing wilayah," paparnya, Jumat (13/1).

Menurutnya, percepatan penurunan stunting menjadi salah satu program prioritas nasional kaitannya dalam pembangunan manusia Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan. Hal tersebut tertuang dalam Perpres No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam peraturan tersebut pemerintah mempercepat pencapaian target penu-

runan angka prevalensi stunting menjadi 14 persen di tahun 2024. Sedangkan di Kota Yogya bahkan menargetkan pada 2024 menuju zero stunting.

Emma menguraikan, kasus persoalan pertumbuhan pada anak tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Terutama dikarenakan pola asuh orangtua pada anak yang belum tepat. Hal ini kerap terjadi akibat pernikahan dini atau kehamilan yang tidak diinginkan, di mana kondisi orangtua belum siap secara fisik dan psikis. "Pola asuh ini ternyata menjadi faktor utama penyebab terjadinya stunting. Tidak sedikit pernikahan dini atau kehamilan tidak diinginkan terjadi, yang memicu ibu ini belum siap secara fisik dan psikis. Begitu juga dengan kesiapan orangtua untuk mengasuh anak dari segi wawasan dan pengetahuan," urainya.

Menurutnya, percepatan antisipasi dan penanganan kasus stunting dilakukan dengan dua intervensi yakni spesifik dan sensitif. Dinas Kesehatan berperan pada intervensi spesifik sekitar 30 persen, sementara 70 persen lainnya merupakan peran lintas sektor

bekerja sama dengan OPD lain untuk mengentaskan masalah stunting. "Pada intervensi spesifik ini upaya yang dilakukan adalah pemantauan langsung pada lima sasaran di setiap wilayah Kota Yogya, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita itu sendiri," jelasnya.

Sementara Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinkes Kota Yogya Riska Novriana, menambahkan intervensi spesifik yang dilakukannya lebih pada ke dalam tata laksana penanganan di setiap puskesmas. Sedangkan intervensi sensitif ada di wilayah digencarkan oleh tim percepatan penurunan stunting yang sudah terbentuk. "Tiap kelurahan minimal ada dua tim yang terdiri dari unsur tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB. Tiga unsur tersebut memiliki tugas pokok melakukan pendampingan ke lima sasaran utama tadi. Jadi upaya menekan angka stunting ini benar-benar bisa lebih cepat tertangani karena di level wilayah dilakukan pendampingan dan pantauan dengan tepat," tandasnya. **(Dhi)-f**

DINDUKCAPIL SIAP BANTU AKTIVASI

Warga Yogya Didorong Akses Identitas Digital

YOGYA (KR) - Pemerintah di awal tahun ini mulai mengencarkan sosialisasi identitas kependudukan digital atau Digital ID. Masyarakat umum atau warga di Kota Yogya pun didorong untuk mengakses layanan tersebut melalui gadget atau telepon seluler.

Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya Bram Prasetyo, aplikasi Digital ID sudah bisa diunduh melalui gadget. "Masyarakat bisa mengaksesnya dengan leluasa, nanti kami bantu untuk proses aktivasinya," jelasnya, Jumat (13/1).

Warga yang kesulitan mengunduh aplikasi tersebut juga akan dibantu oleh petugas Dindukcapil Kota Yogya. Keberadaan identitas kependudukan digital itu juga akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik yang membutuhkan verifikasi KTP elektronik. Hal ini karena identitasnya sudah tersimpan dalam aplikasi atau berbasis digital sehingga tidak perlu membawa KTP elektronik secara fisik.

Bram mengaku, dorongan bagi masyarakat untuk memiliki Digital ID selalu disampaikan ketika warga mengakses layanan kependudukan. Misalnya ketika masyarakat mencetak KTP elektronik, petugas memberikan informasi menge-

nai identitas kependudukan digital dan menawarkan untuk memilikinya. "Ketika blangko KTP elektronik di Kota Yogya habis beberapa waktu lalu, kami juga mengintensifkan informasi mengenai identitas digital ini. Jadi, sembari menunggu blangko kembali tersedia, masyarakat sebenarnya bisa mengunduh identitas digital," imbuhnya.

Kendati demikian, diakuinya masih banyak masyarakat yang belum merasa mantap apabila belum memiliki KTP elektronik dalam bentuk fisik dibanding identitas dalam bentuk digital. Oleh karena itu program dari pemerintah pusat tersebut akan terus disosialisasikan secara bertahap. Diawali dari pejabat di lingkungan Pemkot Yogya kemudian diperluas untuk pegawai dan masyarakat. Meski kelak berbagai data kependudukan dapat diakses melalui telepon seluler, namun untuk saat ini baru tersedia untuk KTP dan kartu keluarga (KK).

Di samping itu, pemerintah juga memastikan keamanan data karena data identitas kependudukan digital tersebut tersimpan di server terpusat secara nasional. Sehingga data identitas di telepon selular hanya bisa diakses oleh pemilik telepon yang bersangkutan. **(Dhi)-f**